

Katalog BPS: 3303002.51

STATISTIK PERUMAHAN PROVINSI BALI 2014



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

STATISTIK PERUMAHAN PROVINSI BALI 2014



STATISTIK PERUMAHAN

PROVINSI BALI 2014

ISSN : 2356-4245
Katalog BPS : 3303002.51
Nomor Publikasi : 51523.1502
Ukuran Buku : 14,8 cm × 21 cm
Jumlah Halaman : x + 60 halaman
Naskah : BPS Provinsi Bali

Tim Penyusun Naskah :

- Penanggung Jawab Umum : Panusunan Siregar
- Penanggung Jawab Teknis : Indra Susilo
- Anggota : 1. Budiwati Dwi Astuti
2. Dewa Ayu Eka Sumarningsih

Penyunting : Bidang Statistik Sosial
Gambar Kulit : Bidang Statistik Sosial
Sumber Gambar : www.kratonpedia.com dan
www.kerisbudaya.blogspot.co.id.
Diterbitkan Oleh : BPS Provinsi Bali


Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Perumahan Provinsi Bali 2014 merupakan kelanjutan dari Statistik Perumahan tahun 2013 yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pengguna data. Statistik perumahan yang disajikan menggambarkan kondisi perumahan dari dimensi status penguasaan bangunan tempat tinggal, kualitas, dan fasilitas bangunan tempat tinggal di Provinsi Bali tahun 2014. Data yang digunakan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor tahun 2014 yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pembahasan yang disajikan dilakukan secara deskriptif dalam bentuk tabel dan grafik.

Meskipun publikasi ini telah disiapkan dengan sebaik-baiknya, dan telah diupayakan berbagai perbaikan dalam setiap tahunnya, namun tidak tertutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca dan pengguna data merupakan bahan rujukan dan evaluasi guna perbaikan dan penyempurnaan publikasi mendatang. Atas perhatian dan bantuan dari semua pihak, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Denpasar, September 2015
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Kepala,



Panusunan Siregar



PANGAWEJANG STATISTIK

1. Membangun itu sulit, tetapi jauh lebih sulit melaksanakan pembangunan tanpa dukungan data statistik.
2. Data yang baik, akurat, bebas bias, dan terpercaya adalah data yang dikumpulkan berdasarkan metodologi statistik yang jelas dan benar.
3. Jangan pernah mengharapkan bahwa setiap data yang dikumpulkan itu, seratus persen benar sekalipun metodologi statistiknya sudah benar, karena data itu masih dikumpulkan oleh manusia.
4. BPS dalam setiap melakukan pengumpulan data, memiliki prinsip bahwa data yang dikumpulkan itu pasti mengandung kesalahan, tetapi dalam melaporkan dan mendiseminasikan datanya BPS tidak melakukan kebohongan.
5. Data bagaikan Kompas dan Pelita.

copyright@panusunan_siregar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PANCA WEJANG STATISTIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
I PENDAHULUAN	1
II RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI	5
2.1. Ruang Lingkup	5
2.2. Sumber Data	5
2.3. Konsep dan Definisi	6
III ULASAN RINGKAS	19
3.1. Status Penguasaan Tempat Tinggal	19
3.2. Kualitas Bangunan Rumah Tempat Tinggal	24
3.2.1. Luas Lantai	24
3.2.2. Jenis Lantai Terluas	25
3.2.3. Jenis Atap Terluas	27
3.2.4. Jenis Dinding Terluas	28
3.3. Fasilitas Rumah	29
3.3.1. Sumber Penerangan	30
3.3.2. Sumber Air Minum	31
3.3.3. Fasilitas Tempat Buang Air Besar	35
IV KESIMPULAN	41
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Rumah di Provinsi Bali Tahun, 2014	30
Tabel 3.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar dan Jenis Kloset di Provinsi Bali, 2014	39
Tabel	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2014	47
Tabel	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Status Tanah Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2014	48
Tabel	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2014	49
Tabel	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2014	50
Tabel	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2014	51
Tabel	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Bali, 2014	52
Tabel	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Sumber Air Minum Utama di Provinsi Bali, 2014	53
Tabel	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Jarak Sumber Air Minum Utama ke Tempat Penampungan Limbah/ Kotoran/Tinja Terdekat di Provinsi Bali, 2014	55
Tabel	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Cara Memperoleh Air Minum di Provinsi Bali, 2014	56

Tabel	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Penggunaan Fasilitas Air Minum di Provinsi Bali, 2014	57
Tabel	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Status Penggunaan Fasilitas Tempat Buang air Besar di Provinsi Bali, 2014	58
Tabel	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kloset di Provinsi Bali, 2014	59
Tabel	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Bali, 2014	60

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2013 - 2014.....	20
Gambar 3.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2014	21
Gambar 3.3	Persentase Rumah Tangga yang Tinggal di Rumah Berstatus Kontrak dan Sewa di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, 2013-2014	22
Gambar 3.4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah Sendiri Menurut Status Tanah Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2014	23
Gambar 3.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai di Provinsi Bali, 2014	24
Gambar 3.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Provinsi Bali, 2013-2014	26
Gambar 3.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2014	26
Gambar 3.8	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2014	27
Gambar 3.9	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Provinsi Bali, 2014.....	29

Gambar 3.10	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Provinsi Bali, 2013-2014	31
Gambar 3.11	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Bali, 2014.....	32
Gambar 3.12	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Bali, 2014	34
Gambar 3.13	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar di Provinsi Bali, 2014	36
Gambar 3.14	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Bali, 2014	37
Gambar 3.15	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset di Provinsi Bali, 2014	39

PENDAHULUAN

Pangan dan sandang adalah kebutuhan dasar yang selalu menjadi prioritas untuk dipenuhi. Disamping pangan dan sandang, manusia juga membutuhkan papan atau tempat tinggal untuk tempat berlindung. Ketiga elemen tersebut menjadi kebutuhan dasar manusia yang memiliki kedudukan sama penting dengan skala prioritas yang berbeda, yang umumnya menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Pentingnya tempat tinggal bagi masyarakat menjadikan Negara turut serta dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal ini. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) telah menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pentingnya perumahan bagi masyarakat juga menjadi agenda global tentang permukiman. Dalam

kesepakatan Agenda 21 (1992) dan Deklarasi Habitat II (1996) disebutkan bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi hak bagi semua orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau (*adequate and affordable shelter for all*).

Mengingat pentingnya peran pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan perumahan, maka dukungan data perumahan yang terpercaya sangat dibutuhkan. Idealnya data tersebut adalah data termutakhir karena dinamika kehidupan sosial, ekonomi, serta lingkungan masyarakat yang selalu berkembang, membuat kondisi perumahan pun akan selalu berkembang atau mengalami perubahan sesuai dengan siklus kehidupan. Data perumahan yang baik dan terpercaya akan membuat pembangunan di bidang perumahan menjadi lebih terarah, apalagi pembangunan perumahan di Bali.

Data perumahan yang tersedia secara berkesinambungan akan membantu khususnya bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam membuat perencanaan dan evaluasi program pembangunan di bidang perumahan. Salah satu program pembangunan perumahan yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah program bedah rumah. Program bedah rumah merupakan salah satu upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali yang bertujuan agar keluarga miskin memiliki rumah yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal (<http://www.birohumas.baliprov.go.id/>). Kriteria rumah tidak layak huni yang digunakan adalah luas bangunan kurang dari 8 m², lantai tanah/bambu/rumbia/kayu kualitas rendah, dinding bambu/rumbia/kayu kualitas rendah, atap bambu/ rumbia/kayu kualitas rendah, memasak dengan kayu bakar/arang, penerangan bukan listrik, sumber air minum

sumur/sungai/air hujan, dan tidak memiliki kamar mandi/jamban/kakus. Semua indikator tersebut adalah beberapa data perumahan yang juga dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans). Walaupun dalam publikasi ini hanya menampilkan data *aggregate*, namun dapat dijadikan gambaran atau alat deteksi oleh pemerintah mengenai kondisi perumahan di suatu wilayah, yang dalam publikasi ini disajikan sampai tingkat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Statistik perumahan merupakan potret karakteristik perumahan dalam suatu periode di suatu wilayah. Publikasi ini merupakan potret karakteristik perumahan di Provinsi Bali kondisi tahun 2014. Statistik tentang perumahan ini mencakup status penguasaan tempat tinggal, kualitas bangunan tempat tinggal, dan fasilitas rumah.

RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI

2.1. Ruang Lingkup

Cakupan publikasi ini adalah rumah tangga di seluruh kabupaten/kota di Bali hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Ruang lingkup analisis adalah karakteristik perumahan yang dibagi ke dalam tiga dimensi, yaitu status penguasaan tempat tinggal, kualitas bangunan tempat tinggal, serta fasilitas rumah, yang nantinya diukur dalam beberapa indikator.

2.2. Sumber Data

Sumber data publikasi Statistik Perumahan tahun 2014 adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2014. Data tersebut masih bersifat sementara dan akan diperbaiki jika sudah tersedia data final. Susenas 2014 mencakup 300.000 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dari seluruh sampel rumah tangga tersebut, jumlah sampel rumah tangga Provinsi Bali sebanyak 5.760 rumah tangga yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Pelaksanaan lapangan dibagi menjadi empat triwulan (Maret, Juni, September, dan Desember) sehingga setiap triwulan jumlah sampel sebesar 1.440 rumah tangga (5.760 rumah tangga dibagi ke dalam empat triwulan). Data hasil pencacahan setiap triwulan digunakan untuk estimasi angka level provinsi dan nasional, sedangkan data kumulatif (gabungan data Triwulan I

sampai Triwulan IV) dapat disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Dalam Susenas tahun 2014, data Kor (pokok) yang dikumpulkan mencakup keterangan umum ART, keterangan tempat lahir dan tempat tinggal 5 tahun yang lalu, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, pengeluaran rumah tangga, keterangan sosial ekonomi lainnya, teknologi komunikasi dan informasi, serta keterangan sumber penghasilan rumah tangga.

Keterangan perumahan sendiri mencakup penguasaan bangunan tempat tinggal, jenis atap, jenis dinding, jenis dan luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan, dan bahan bakar/energi utama untuk memasak.

2.3. Konsep dan Definisi

Mengingat data yang digunakan di dalam publikasi ini adalah Susenas, maka konsep dan definisi dalam publikasi ini pun menggunakan konsep dan definisi Susenas, yaitu:

- **Rumah tangga biasa** adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga biasa umumnya terdiri dari ibu, bapak, dan anak. Rumah tangga biasa juga mencakup:
 1. Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri.
 2. Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus masih dalam (sub) blok sensus yang sama dianggap satu rumah tangga.

3. Pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondok dianggap sebagai anggota rumah tangga induk semangnya.
 4. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.
- **Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati**, dibedakan menjadi tujuh kategori:
 1. **Rumah milik sendiri**, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah menjadi milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.
 2. **Rumah kontrak**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misal 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju jika diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.
 3. **Rumah sewa**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah

tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

4. **Rumah bebas sewa milik orang lain**, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga bersangkutan tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apa pun.
 5. **Rumah bebas sewa milik orang tua/sanak/saudara**, jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang tua/sanak/saudara dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apa pun untuk mendiami tempat tinggal tersebut, dimana orang tua/sanak/saudaranya tidak tinggal di rumah tersebut atau bukan anggota rumah tangga.
 6. **Rumah dinas**, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak.
 7. **Lainnya**, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.
- **Status tanah tempat tinggal**, pertanyaan ini hanya ditujukan untuk rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri yang dibedakan menjadi:
 1. **Hak milik** adalah hak turun temurun terkuat yang dapat dimiliki orang atas tanah, dengan mengingat hak itu mempunyai fungsi sosial. Tanah tersebut dapat dikuasai

tanpa batas waktu tertentu, dapat diwariskan dan dapat dialihkan kepada pihak lain.

2. **Hak guna bangunan** adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, bila diperlukan dapat diperpanjang lagi 20 tahun (pasal 35 ayat 1 dan 2 UU Pokok Agraria/UUPA).
 3. **Hak pakai** adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain. Pemberian wewenang dan kewajiban ditentukan dalam keputusan oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah, tetapi bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, atau segala sesuatu selama tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UU ini (pasal 41 UUPA).
 4. **Lainnya** adalah status tanah tempat tinggal selain yang tersebut di atas, seperti hak sewa tanah, hak gadai, hak menumpang, tanah serobotan, termasuk rupa yang tinggal di apartemen, rumah susun, dan rumah di atas air.
- **Atap** adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga kepala rumah tangga/anggota rumah tangga yang mendiami di bawahnya merasa terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut. Jenis atap dibedakan menjadi tujuh kategori, yaitu:
 1. **Beton** adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil dan pasir yang diaduk dengan air.

2. **Genteng** adalah tanah liat yang dicetak dan dibakar. Termasuk juga genteng beton (genteng yang terbuat dari campuran semen dan pasir), genteng *fiber cement* dan genteng keramik.
 3. **Sirap** adalah atap yang terbuat dari kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.
 4. **Seng** adalah atap yang terbuat dari bahan seng. Atap seng berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut *decrabond* (seng yang dilapisi *epoxy* dan *acrylic*).
 5. **Asbes** adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Pada umumnya atap asbes berbentuk gelombang.
 6. **Ijuk/rumbia** adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam.
 7. **Lainnya** adalah atap selain jenis yang disebutkan di atas, misalnya papan, bambu dan daun-daunan.
- **Dinding** adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan menggunakan lebih dari satu jenis dinding maka yang dicatat adalah jenis dinding yang terluas, dan jika luasnya sama maka yang dicatat adalah yang nilainya lebih tinggi.
 1. **Tembok** adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen. Termasuk dinding yang terbuat dari pasangan batu merah

dan diplester namun dengan tiang kolom berupa kayu balok, yang biasanya berjarak 1-1,5 m.

2. **Kayu** adalah dinding yang terbuat dari kayu.

3. **Bambu** adalah dinding yang terbuat dari bambu, termasuk dinding yang terbuat dari anyaman bambu dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.

4. **Lainnya**, adalah selain tembok, kayu, dan bambu.

- **Lantai**, bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan baik terbuat dari tanah maupun bukan tanah seperti keramik, marmer, papan, semen dan sejenisnya. Vinyl atau karpet tidak dianggap sebagai bagian dari jenis lantai.
- **Luas lantai** adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai, seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen), dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung). Bila rumah dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai ruangan yang dipakai bersama dibagi dengan banyaknya rumah tangga ditambah dengan dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan. Untuk rumah bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas lantai dari semua tingkat yang ditempati.
- **Sumber air minum**
 1. **Air kemasan bermerk** adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan

botol (500 ml, 600 ml, 1 liter, 12 liter, atau 19 liter) atau gelas.

2. **Air isi ulang** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki merk.
3. **Air ledeng meteran** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM, PDAM atau BPAM, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
4. **Air ledeng eceran** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air PAM) namun disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan.
5. **Air sumur bor/pompa** adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin termasuk sumur artesis (sumur pantek).
6. **Sumur terlindung** adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.
7. **Sumur tak terlindung** adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut tidak dilindungi oleh tembok dan lantai sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

8. **Mata air terlindung** adalah sumber air permukaan dimana air timbul dengan sendirinya dan terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.
 9. **Mata air tak terlindung** adalah sumber air permukaan dimana air timbul dengan sendirinya, tetapi tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.
 10. **Lainnya**, adalah sumber air selain di atas seperti air waduk/danau.
- **Jarak sumber air minum ke tempat penampungan limbah/kotoran/ tinja terdekat** adalah jarak antara sumber air minum yang berasal dari pompa/sumur/perigi/mata air ke tempat penampungan limbah, kotoran ternak, dan tinja yang terdekat, baik yang ada di lingkungan rumah tangga responden itu sendiri maupun tetangga.
 - **Cara memperoleh air minum** dikategorikan menjadi:
 1. **Membeli**, apabila membeli air untuk minum
 2. **Langganan** adalah apabila membeli air untuk minum secara periodik/bulanan. Contoh: leding dari PAM/PDAM/BPAM, atau atau air kemasan yang membeli secara berlangganan.

Dalam publikasi ini, air minum yang diperoleh dengan cara membeli dan langganan dimasukkan sebagai membeli.
 3. **Tidak membeli** adalah jika diperoleh dengan usaha sendiri tanpa harus membayar.

- **Penggunaan fasilitas air minum** adalah instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/PDAM atau non PAM/PDAM termasuk sumur dan sumur pompa.

Adapun penggunaan fasilitas air minum dibedakan dalam empat kategori:

1. **Sendiri**, jika fasilitas air minum hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja.
2. **Bersama**, bila fasilitas air minum hanya digunakan oleh rumah tangga responden bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu.
3. **Umum**, bila fasilitas air minum dapat digunakan oleh setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga responden.
4. **Tidak ada fasilitas**, bila fasilitas air minum rumah tangga responden jaraknya > 2,5 km atau mengambil air langsung dari sungai/danau/air hujan tanpa proses penjernihan dengan mesin penjernih air atau membeli.

- **Fasilitas tempat buang air besar** adalah ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh rumah tangga responden. Fasilitas tempat buang air besar dibedakan dalam empat kategori:

1. **Sendiri**, bila fasilitas tersebut hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja.
2. **Bersama**, bila fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga responden dengan beberapa rumah tangga tertentu.
3. **Umum**, bila fasilitas tersebut dapat digunakan oleh siapa pun, termasuk rumah tangga responden.

4. **Tidak ada**, bila rumah tangga responden tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar, misal menggunakan lahan terbuka untuk buang air besar (tanah lapang/kebun/halaman/semak belukar), pantai, sungai, danau, kolam, dan lainnya.

- **Jenis kloset**

Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus dan dibedakan menjadi empat macam:

1. **Kloset leher angsa** adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf “U” (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.
2. **Kloset plengsengan** adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke tempat pembuangan kotoran.
3. **Kloset cemplung/cubluk** adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran, sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhirnya.
4. **Tidak pakai kloset** adalah jika jamban/kakus tidak memakai kloset.

- **Tempat pembuangan akhir tinja** dibedakan menjadi:

1. **Tangki** adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton baik mempunyai bak resapan maupun tidak, termasuk disini daerah permukiman yang mempunyai Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota. Dalam sistem pembuangan limbah cair seperti ini, air limbah ruta tidak ditampung di

dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa (dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi 2 bagian, yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, laut). Pada beberapa jenis jamban/kakus yang disediakan ditempat umum/keramaian, seperti di taman kota, tempat penampungannya dapat berupa tong yang terbuat dari logam atau kayu. Tempat penampungan ini bisa dilepas untuk diangkut ke tempat pembuangan. Dalam hal demikian tempat pembuangan akhir dari jamban/kakus ini dianggap sebagai tangki.

2. **Kolam/sawah**, bila limbahnya dibuang ke kolam/sawah.
 3. **Sungai/danau/laut**, bila limbahnya dibuang ke sungai/danau/laut.
 4. **Lubang tanah**, bila limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).
 5. **Pantai/tanah lapang/kebun**, bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun.
 6. **Lainnya**, bila limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan di atas.
- **Sumber penerangan** adalah penerangan yang biasanya digunakan oleh rumah tangga bersangkutan sehari-hari. Bila rumah tangga menggunakan lebih dari satu sumber penerangan, yang dicatat sebagai sumber penerangan adalah yang

mempunyai nilai lebih tinggi. Sumber penerangan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1. **Listrik PLN** adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN.
2. **Listrik non-PLN** adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

Rumah tangga responden dikatakan menggunakan listrik PLN, baik menggunakan maupun tidak menggunakan meteran (volumetrik).

3. **Petromak/aladin**, termasuk sumber penerangan dari minyak tanah, seperti petromak/lampu tekan, dan aladin (termasuk lampu gas).
4. **Pelita/sentir/obor**, termasuk lampu minyak tanah lainnya seperti lampu teplok, sentir, pelita, dan sejenisnya.
5. **Lainnya**, termasuk lampu karbit, lilin, biji jarak, dan kemiri.

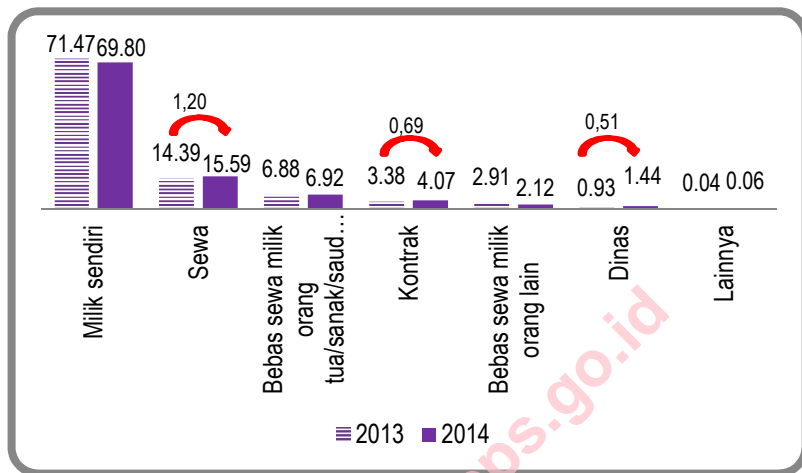
ULASAN RINGKAS

3.1. Status Penguasaan Tempat Tinggal

Rumah sebagai tempat tinggal merupakan kebutuhan mendasar manusia dan setiap orang mempunyai hak untuk memiliki seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Keterbatasan ekonomi sering menjadi kendala dalam pemenuhannya.

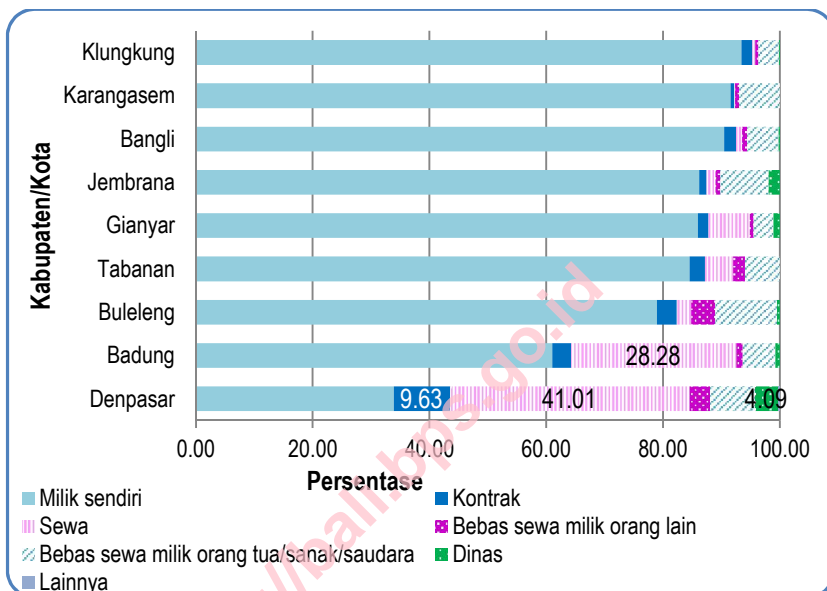
Perbedaan keadaan ekonomi menyebabkan perbedaan cara dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Masyarakat dengan penghasilan tinggi umumnya memiliki kesempatan lebih besar untuk memiliki rumah sendiri dibanding masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mengontrak, sewa, atau tinggal di rumah milik saudara/lainnya baik dengan mengeluarkan biaya maupun tanpa mengeluarkan biaya sering menjadi pilihan. Bali sebagai salah satu wilayah dengan harga rumah hunian tinggi di Indonesia juga berlaku hal yang sama. Cara rumah tangga di Bali dalam pemenuhan kebutuhan rumah cukup bervariasi pada tahun 2014, seperti yang terlihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2013- 2014



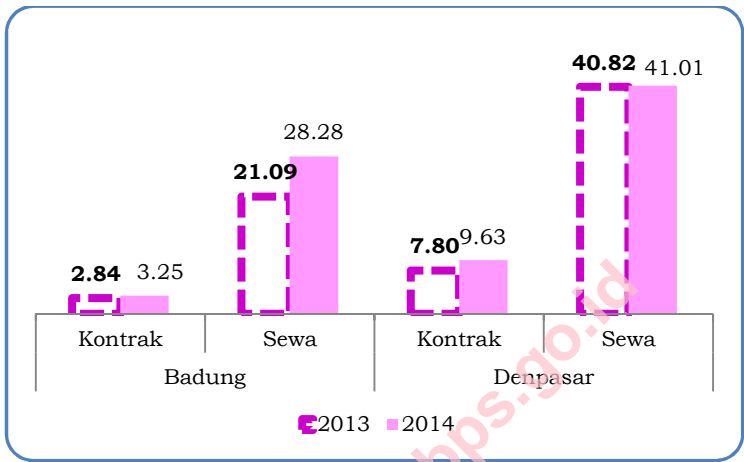
Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2014 sebagian besar rumah tangga di Bali telah memiliki rumah sendiri (69,80 persen). Menariknya, dalam 3 tahun terakhir (2012-2014) terjadi penurunan persentase rumah yang merupakan milik sendiri, mulai dari 75 persen pada tahun 2012 menjadi 71,47 persen pada tahun 2013, dan turun lagi menjadi 69,80 persen pada tahun 2014 (lihat Lampiran Tabel 1). Di sisi lain terjadi kenaikan persentase rumah tangga yang mengontrak, menyewa (kos), dan tinggal di rumah dinas pada tahun 2014. Rumah tangga yang mengontrak rumah naik sebesar 0,69 poin persen, yang menyewa naik 1,20 poin persen, dan yang tinggal di rumah dinas naik sebesar 0,51 poin persen dibanding tahun 2013.

Gambar 3.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2014



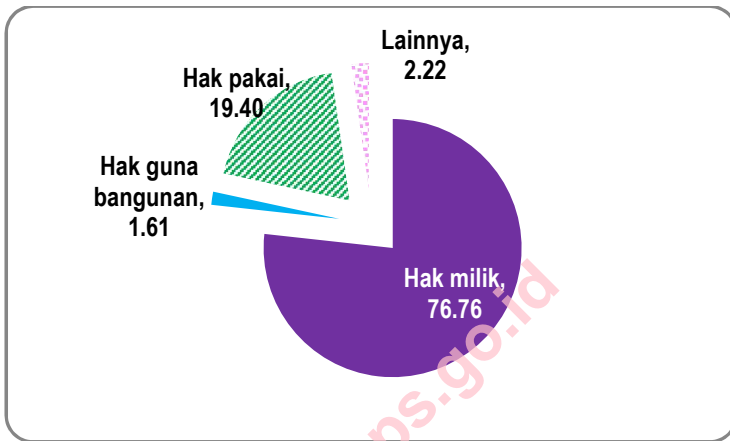
Fenomena kenaikan persentase rumah tangga yang menyewa dan mengontrak rumah tercatat jelas di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung (lihat Gambar 3.2.) sebagai daerah penerima migran. Di kedua daerah tersebut persentase rumah tangga yang menyewa bangunan tempat tinggal adalah yang tertinggi di Bali. Rumah tangga yang menyewa tempat tinggal di Denpasar mencapai 41,01 persen, naik dibanding tahun 2013 yang tercatat 40,82 persen. Di Badung juga terjadi kenaikan, yaitu dari 21,09 persen pada tahun 2013 menjadi 28,28 persen pada tahun 2014 (lihat Gambar 3.3). Sementara, persentase rumah tangga yang mengontrak di Kota Denpasar adalah yang tertinggi di Bali, yaitu mencapai 9,63 persen pada tahun 2014, sedangkan di kabupaten lain hanya berkisar 1-3 persen (lihat Lampiran Tabel 1).

Gambar 3.3 Persentase Rumah Tangga yang Tinggal di Rumah Berstatus Kontrak dan Sewa di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, 2013-2014



Hal ini wajar terjadi karena Denpasar dan Badung adalah daerah tujuan migran untuk bekerja, mencari pekerjaan atau melanjutkan sekolah. Mereka umumnya memilih kos atau mengontrak rumah selama bertempat tinggal di Denpasar dan Badung. Untuk memiliki rumah sendiri para pendatang harus merogoh kantong sangat dalam mengingat harga rumah yang sangat mahal di kedua daerah tersebut. Alasan lainnya kemungkinan para migran tersebut berencana hanya tinggal sementara di Denpasar dan Badung sehingga lebih memilih tinggal di kos atau rumah kontrakan. Disamping lebih memilih tinggal di kos atau rumah kontrak, para pekerja formal di Denpasar juga cenderung memilih tinggal di rumah dinas yang merupakan fasilitas dari tempatnya bekerja.

Gambar 3.4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah Sendiri Menurut Status Tanah Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2014



Dari Gambar 3.4 ternyata di Bali tanah yang ditempati oleh rumah tangga (khusus rumah tangga yang memiliki rumah sendiri) yang berstatus hak milik baru mencapai 76,76 persen. Dengan tanah yang berstatus hak milik, maka rumah tangga tersebut memiliki hak mewariskan atau mengalihkan kepemilikannya ke pihak lain.

Selain itu, di Bali juga ditemukan cukup banyak rumah tangga yang membangun rumah di tanah yang berstatus hak pakai, yaitu mencapai 19,40 persen. Tanah berstatus hak pakai tersebut mencakup tanah adat, yaitu berupa tanah pekarangan desa (PKD). Tanah pekarangan desa ini merupakan tanah yang dikuasai desa, yang diberikan kepada warga desa (krama desa) untuk mendirikan perumahan dan kepada setiap krama desa tersebut melekat kewajiban berupa tenaga atau materi kepada desa adat. Tanah ini tidak dapat diperjualbelikan oleh krama desa (Aspriani dkk, 2014).

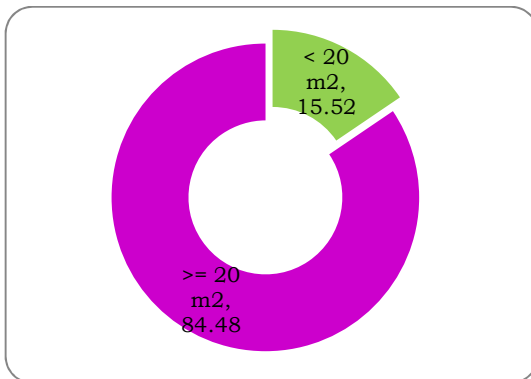
3.2 Kualitas Bangunan Rumah Tempat Tinggal

Agar rumah menjadi tempat yang nyaman dan sehat untuk ditempati, rumah hendaknya memenuhi standar kesehatan. Untuk memenuhi standar kesehatan, pembangunan rumah dapat dimulai dari pemilihan bahan bangunan yang kualitasnya bagus dan sesuai dengan standar kesehatan. Misalnya, pemilihan jenis lantai hendaknya dipilih lantai yang kedap air dan mudah dibersihkan.

3.2.1. Luas Lantai

Salah satu elemen kualitas kondisi tempat tinggal adalah ketersediaan ruang yang cukup. Luas bangunan tempat tinggal sehat harus cukup untuk penghuni di dalamnya atau disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Luas bangunan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan kepadatan penghuni (*overcrowded*). Salah satu dampak dari hunian *overcrowded* ini adalah mudahnya penularan penyakit antar penghuni rumah.

Gambar 3.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai di Provinsi Bali, 2014



Berdasarkan Gambar 3.5, pada tahun 2014 sebagian besar (84,48 persen) rumah yang ditempati oleh rumah tangga di Bali mempunyai rumah dengan luas lantai ≥ 20 m².

Jika dirinci lagi, ternyata sebagian besar rumah di Bali sudah memiliki luas $\geq 50 \text{ m}^2$ (lihat Lampiran Tabel 3) yang mencapai 57,47 persen. Ini berarti lebih dari setengah rumah tangga di Bali sudah menempati rumah yang memenuhi syarat rumah sehat. Di Indonesia standar rumah sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan, dan khusus tentang luas rumah tercantum pada pasal 22 ayat 3 yang menyebutkan luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 m^2 .

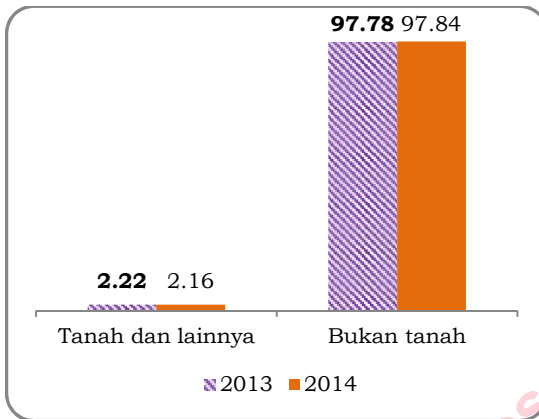
Fakta menarik terungkap dari hasil Susenas 2014 ini, yaitu Kabupaten Badung dan Kota Denpasar tercatat sebagai kota dengan persentase rumah tangga yang tinggal di rumah dengan luas lantai $< 20 \text{ m}^2$ tertinggi di Bali, yaitu masing-masing 22,27 persen dan 35,74 persen (lihat Lampiran Tabel 3). Hal ini diduga karena tingginya persentase rumah tangga yang tinggal di rumah sewa (indekos) dengan luas $< 20 \text{ m}^2$.

3.2.2. Jenis Lantai Terluas

Selain luas lantai, jenis lantai juga dapat menjadi indikator penilaian rumah sehat. Lantai dari tanah dianggap kurang memenuhi standar kesehatan karena jika musim hujan akan menjadi lembab dan dapat menjadi media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti diare, cacangan, dan penyakit kulit. Begitu juga ketika musim panas, lantai tanah akan lebih banyak mengeluarkan debu, yang juga dapat menjadi media penyebaran penyakit.

Gambar 3.6. memperlihatkan bahwa mayoritas (97,84 persen) rumah tangga di Bali memiliki rumah dengan lantai bukan dari tanah (marmer/keramik/granit, tegel/teraso, semen, kayu, dan

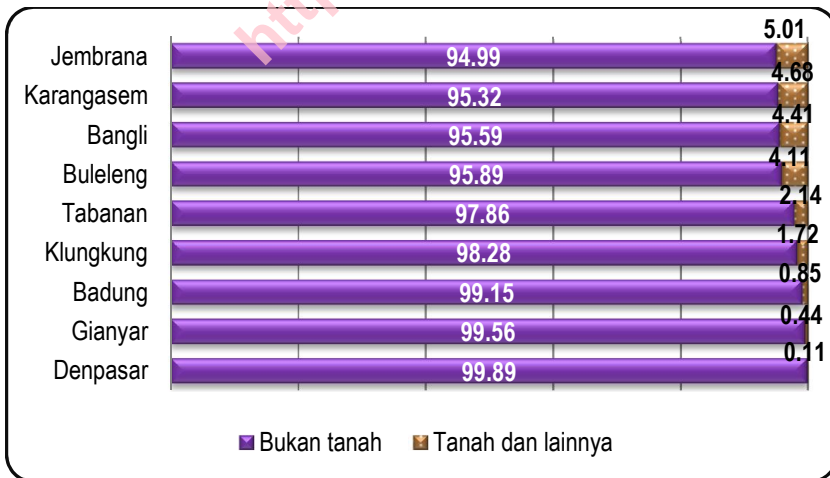
Gambar 3.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Provinsi Bali, 2013-2014



lainnya), dan sisanya 2,16 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan lantai tanah (turun dari 2,22 persen pada tahun 2013). Hal ini cukup menggembirakan karena persentase rumah tangga

yang menempati rumah yang telah memenuhi standar kesehatan meningkat.

Gambar 3.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2014

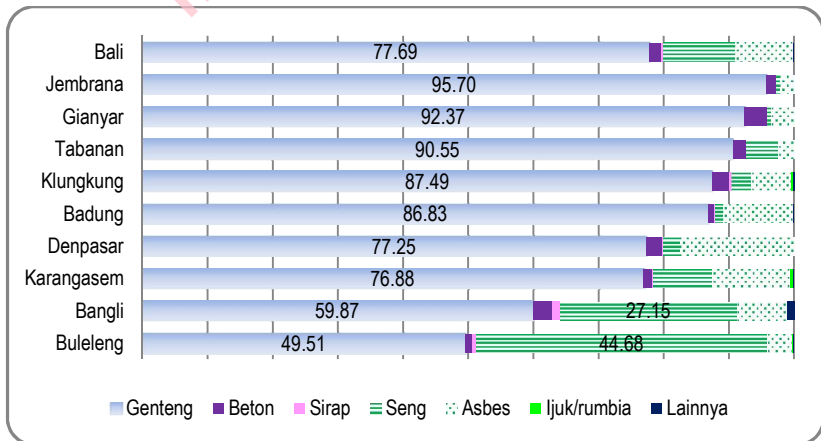


Secara umum, rumah tangga yang tinggal di rumah berlantai tanah masih ada di setiap kabupaten/kota di Bali pada tahun 2014 (lihat Gambar 3.7). Diantara sembilan kabupaten/kota tersebut, Jembrana dan Karangasem paling banyak terdapat rumah tangga yang tinggal di rumah berlantai tanah, masing-masing 5,01 persen dan 4,68 persen.

3.2.3. Jenis Atap Terluas

Atap memiliki fungsi signifikan sebagai pelindung dari hujan maupun panas, sehingga jenis atap biasanya dipilih dari bahan yang sesuai dengan kondisi cuaca di suatu wilayah. Di dataran rendah, biasanya atap rumah memakai genteng dengan tujuan untuk mengurangi suhu panas, sedangkan masyarakat di dataran tinggi lebih memilih atap dari seng agar panas matahari yang diterima dapat disimpan dan dapat menghangatkan bagian dalam rumah. Atap dari genteng lebih cocok untuk rumah di daerah tropis.

Gambar 3.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2014



Hasil Susenas 2014 menunjukkan sebagian besar rumah tangga di Bali (77,69 persen) tinggal di rumah yang beratapkan genteng sesuai dengan keadaan alam Indonesia yang beriklim tropis (lihat Gambar 3.8). Namun untuk beberapa wilayah, masyarakatnya menyesuaikan dengan cuaca di wilayah mereka. Seperti di Bangli dan Buleleng, cukup banyak ditemukan rumah tangga yang rumahnya beratap seng, yaitu masing-masing mencapai 27,15 persen dan 44,68 persen.

Selain menggunakan genteng dan seng, juga ada sebagian rumah tangga di Bali tinggal di rumah yang beratapkan asbes. Atap asbes banyak ditemukan di Denpasar. Di Denpasar persentase rumah tangga yang menggunakan asbes sebagai atap mencapai 17,39 persen (angka tertinggi di Bali).

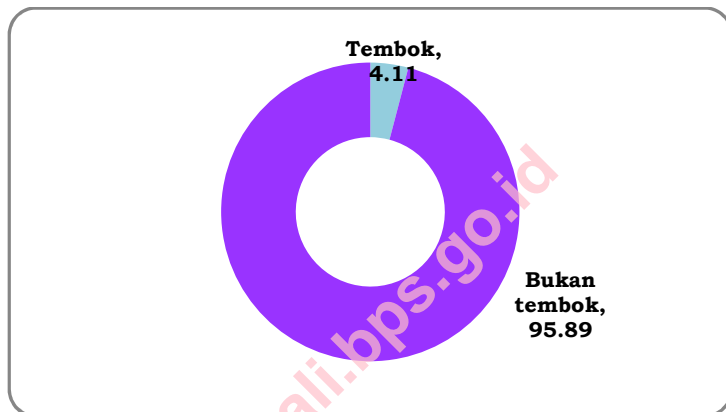
3.2.4. Jenis Dinding Terluas

Agar memenuhi standar kesehatan, jenis dinding yang dipilih adalah dinding dari bahan yang kedap air sehingga dinding terhindar dari basah dan lembab, serta tidak berlumut. Gambar 3.9 menunjukkan bahwa 95,89 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan dinding dari tembok dan hanya 4,11 persen yang tinggal di rumah yang bukan tembok seperti kayu, bambu, dan lainnya. Dibandingkan dengan tahun 2013, persentase tembok mengalami kenaikan, dari 95,48 persen menjadi 95,89 persen (lihat Lampiran Tabel 5).

Bila dilihat menurut kabupaten/kota pada Lampiran Tabel 5, Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten dengan persentase terkecil rumah tangga yang tinggal di rumah berdinding tembok (90,93 persen). Selain tembok, rumah yang berdinding bambu di

Jembrana juga cukup banyak (8,02 persen), yang merupakan angka tertinggi di Bali.

Gambar 3.9 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Provinsi Bali, 2014



3.3. Fasilitas Rumah

Fasilitas rumah tidak hanya penting dari sisi kenyamanan penghuninya, namun tidak kalah penting adalah dari sisi kesehatan. Berikut ini akan dibahas tiga fasilitas dasar yang semestinya tersedia dalam setiap rumah untuk menunjang kenyamanan dan kesehatan para penghuni. Tiga fasilitas dasar tersebut adalah penerangan, sumber air minum/air bersih, dan tempat buang air besar.

Tabel 3.1 Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Rumah di Provinsi Bali, 2014

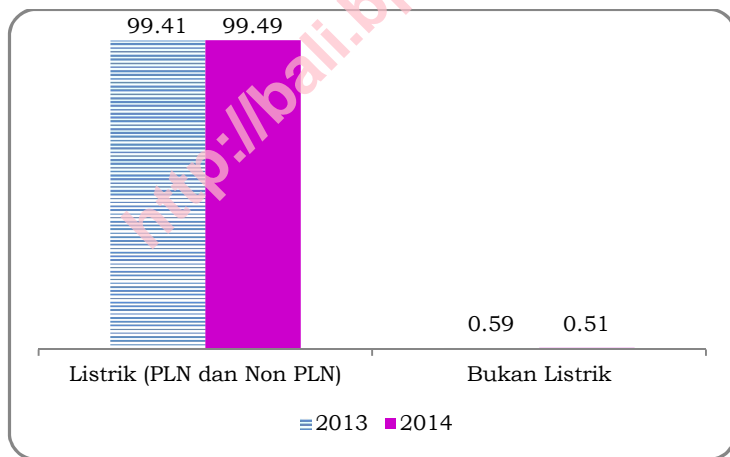
Fasilitas Rumah	Persentase
(1)	(2)
Sumber penerangan	
- Listrik (PLN dan non PLN)	99,49
- Non listrik	0,51
Fasilitas air bersih	
- Sumber air minum	
• Terlindung	93,35
• Tidak terlindung	6,65
- Jarak pompa/sumur/mata air ke tempat penampungan limbah/kotoran/ tinja terdekat	
• < 10 m	11,94
• ≥ 10 m	75,77
• Tidak tahu	12,29
Akses ke sumber air minum	
- Membeli	66,04
- Tidak membeli	33,96
Fasilitas buang air besar	
- Ada	91,01
- Tidak ada	8,99

3.3.1. Sumber Penerangan

Sumber penerangan yang dicakup dalam publikasi ini adalah listrik dan bukan listrik. Listrik meliputi listrik yang bersumber dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) maupun non PLN. Listrik termasuk sumber penerangan buatan karena sumber penerangan jenis ini mampu mendukung aktivitas penghuninya hingga malam hari, tidak seperti sumber penerangan alami (sinar matahari) yang hanya mendukung aktivitas di siang hari.

Listrik semakin menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat seiring meningkat dan kompleksnya aktivitas manusia. Sehingga tidak mengherankan jika hampir semua rumah tangga sudah menggunakan listrik, baik yang dikelola oleh pemerintah ataupun swadaya sendiri. Seperti yang terlihat pada Tabel 3.1, rumah tangga di Bali yang menggunakan listrik sudah mencapai 99,49 persen, ada sedikit peningkatan dibanding tahun 2013 yang baru mencapai 99,41 persen. Penggunaan listrik oleh rumah tangga di Bali menunjukkan kecenderungan naik dari tahun ke tahun. Ini berarti sudah semakin banyak masyarakat Bali yang terlayani listrik.

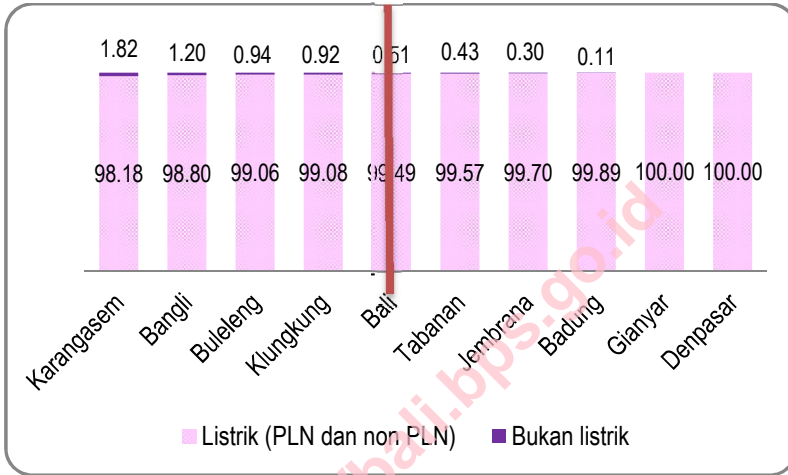
Gambar 3.10 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Provinsi Bali, 2013-2014



Namun masih ada ditemukan rumah tangga di Bali yang belum menikmati listrik. Ini terlihat dari persentase rumah tangga yang menggunakan bukan listrik sebagai sumber penerangan sebesar 0,51 persen. Sumber penerangan bukan listrik yang digunakan oleh rumah tangga-rumah tangga di Bali diantaranya

pelita/ sentir/obor dan lainnya. Ini merupakan pekerjaan rumah untuk Pemerintah Provinsi Bali.

Gambar 3.11 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Bali, 2014



Berdasarkan Gambar 3.11 terlihat bahwa belum semua rumah tangga di kabupaten/kota telah menikmati listrik. Oleh karena itu pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi Bali masih memiliki tugas untuk memberi pelayanan listrik di delapan kabupaten/kota. Kedelapan kabupaten tersebut adalah Kabupaten Karangasem (1,82 persen), Kabupaten Bangli (1,20 persen), Kabupaten Buleleng (0,94 persen), Kabupaten Klungkung (0,92 persen), Kabupaten Tabanan (0,43 persen), Kabupaten Jembrana (0,30 persen), dan Kabupaten Badung (0,11 persen). Secara rinci dapat dilihat pada lampiran Tabel 6.

3.3.2. Sumber Air Minum

Air bersih adalah kebutuhan manusia yang paling dasar yang merupakan sumber kehidupan manusia. Ketiadaan air bersih akan

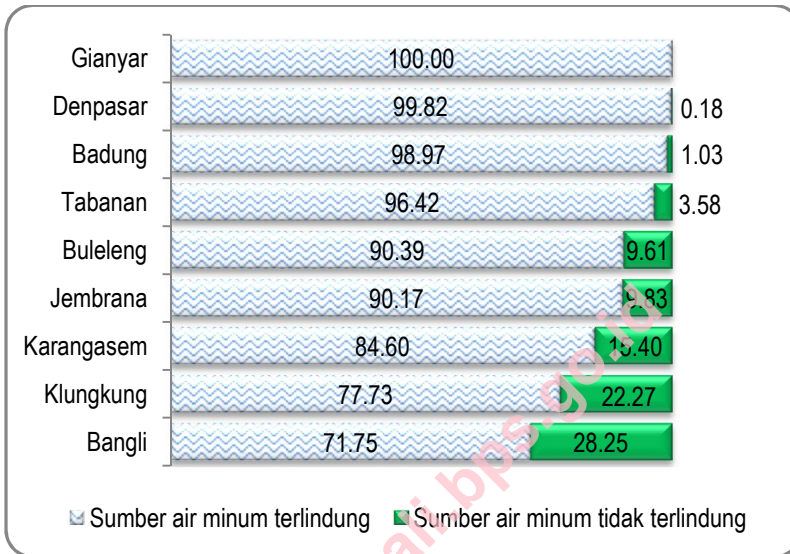
memberi dampak paling signifikan pada kesehatan manusia karena dapat mengakibatkan berbagai penyakit, seperti diare dan cacangan. Ketersediaan air bersih di rumah tangga diukur dari sumber air minum yang digunakan dan jarak sumber air minum ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat.

Air bersih dikatakan tersedia dalam rumah tangga jika sumber air minumnya terlindung, seperti diperoleh dari air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Sumber air minum terlindung tersebut dianggap merupakan sumber air bersih dengan catatan sumber-sumber air minum (sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung) berjarak lebih dari 10 meter ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat.

Pada tahun 2014, sebagian besar (93,35 persen) rumah tangga di Bali telah menggunakan sumber air minum terlindung, namun masih ada sekitar 6,65 persen masih menggunakan sumber air minum tak terlindung. Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum tidak terlindung masih ada di kabupaten/kota di Bali (lihat Tabel 3.1).

Persentase pengguna sumber air minum tidak terlindung tertinggi tercatat di Kabupaten Bangli, yaitu sebesar 28,25 persen (lihat Gambar 3.12.). Sumber air minum tak terlindung di Bangli bersumber dari sumur, mata air, air hujan, dan lainnya. Secara lebih rinci lihat Lampiran Tabel 7. Penggunaan air hujan yang dimaksud tidak hanya diperoleh secara langsung dengan menampung air hujan, tetapi juga termasuk air hujan yang ditampung dan dialirkan ke rumah dengan menggunakan pipa paralon/pipa ledeng.

Gambar 3.12 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Bali, 2014



Persyaratan lain untuk ketersediaan air bersih adalah jarak sumber air minum ke tempat penampungan tinja. Menurut Departemen Kesehatan, agar tidak mencemari sumber air minum, maka lubang penampungan tinja sebaiknya berjarak 10-15 meter dari sumber air bersih. Berdasarkan Tabel 3.1, tercatat 75,77 persen rumah tangga di Bali yang sumber air minumannya berjarak minimal 10 meter. Dibanding tahun 2013, terjadi penurunan persentase rumah tangga dengan karakteristik tersebut sebesar 0,82 persen poin (tahun 2013 sebesar 76,59 persen seperti terlihat pada Lampiran Tabel 8. Sementara itu, rumah tangga yang tidak mengetahui jarak sumber air minum ke tempat penampungan tinja juga cukup banyak, yaitu mencapai 12,29 persen. Fenomena semakin banyaknya rumah tangga yang tinggal di rumah dengan jarak antara sumber air minum ke tempat penampungan tinja

cukup dekat disinyalir sebagai dampak dari semakin padatnya pemukiman di Bali yang identik dengan rumah tipe kecil.

Aspek yang tidak kalah penting dalam penyediaan air minum adalah akses rumah tangga ke sumber air minum, apakah melalui membeli atau tidak. Air minum yang dikategorikan sebagai membeli adalah yang bersumber dari ledeng PAM/PDAM/BPAM, air kemasan, atau menyuruh tetangga untuk mengambil air dari waduk dengan memberi upah, sedangkan dikategorikan sebagai tidak membeli jika memperoleh air minum dengan usaha sendiri tanpa harus membayar.

Pada 2014 sebagian besar rumah tangga di Bali mendapatkan air minum masih dengan cara membeli. Persentase rumah tangga yang membeli berada di kisaran 60 persen. Dari sembilan kabupaten/kota di Bali, rumah tangga di Kota Denpasar paling banyak membeli air minum (90,44 persen) yang umumnya adalah air kemasan atau air isi ulang (lihat Lampiran Tabel 9).

3.3.3. Fasilitas Tempat Buang Air Besar

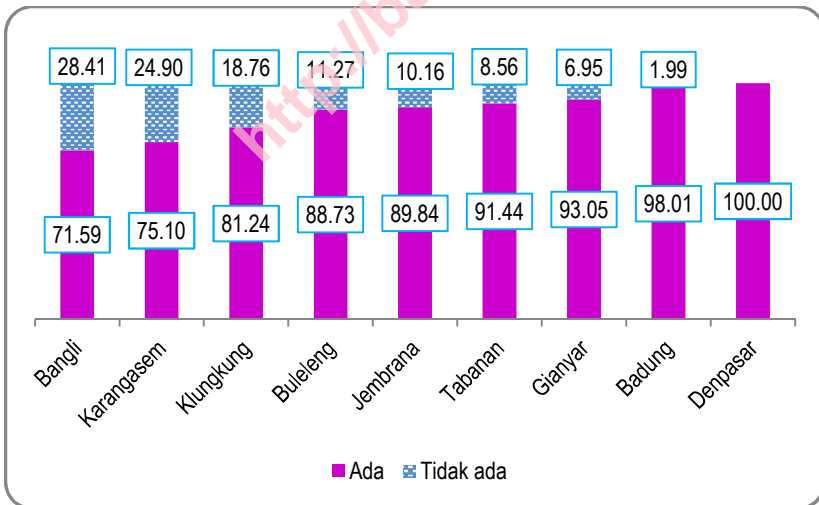
Salah satu sarana sanitasi penting dalam rumah selain sarana air bersih adalah sarana pembuangan kotoran (jamban). Jamban termasuk kelompok sarana sanitasi yang ada dalam 3 komponen penilaian rumah sehat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999.

Persentase rumah tangga di Bali yang telah memiliki fasilitas buang air besar mencapai 91,01 persen, naik dibandingkan tahun 2013 yang hanya mencapai 89,62 persen, baik merupakan fasilitas sendiri, bersama, maupun umum (lihat Lampiran Tabel 11). Persentase rumah tangga yang belum memiliki hanya mencapai 8,99 persen rumah tangga. Hasil ini cukup menggembirakan karena

semakin banyak rumah tangga yang menggunakan sarana sanitasi sehat.

Masih adanya rumah tangga yang tinggal di rumah tanpa jamban, sangat perlu mendapat perhatian. Kotoran yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan berbagai penyakit yang sering disebarkan oleh vektor penyakit seperti lalat. Disamping itu juga dapat mengganggu kenyamanan penduduk di sekitarnya akibat bau yang ditimbulkan. Menurut Keman (2005), penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menjadi faktor risiko terhadap penyakit diare (penyakit penyebab utama kematian balita) disamping penyakit cacangan yang menyebabkan produktivitas kerja menurun.

Gambar 3.13 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar di Provinsi Bali, 2014

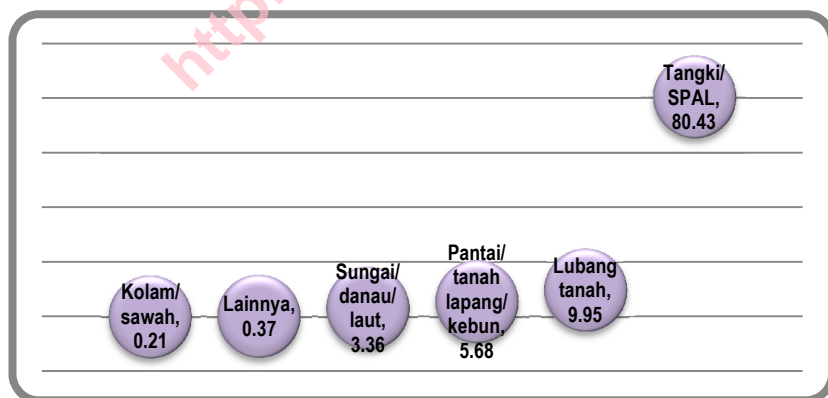


Rumah tangga yang tidak ada fasilitas buang air besar tersebar di mayoritas kabupaten di Provinsi Bali (lihat Gambar 3.13).

Persentase rumah tangga yang tidak ada fasilitas buang air besar tertinggi ditemukan di Kabupaten Bangli (28,41 persen) dan yang terendah tercatat di Kabupaten Badung (1,99 persen). Rumah tangga yang tidak ada fasilitas buang air besar ini mungkin membuang kotorannya langsung di kebun, sungai, sawah, atau tempat tertentu lainnya.

Aspek yang paling penting dari fasilitas pembuangan air besar adalah tempat pembuangan akhir tinja, apakah sudah menggunakan tangki/SPAL (Saluran Pembuangan Akhir Limbah), atau limbah dibuang ke kolam/sawah, sungai/danau/laut, ke dalam lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lainnya. Dari beberapa jenis tempat pembuangan tinja tersebut, SPAL yang paling memenuhi standar kesehatan karena mengurangi tercemarnya sumber air minum rumah tangga dari resapan limbah tinja.

Gambar 3.14 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Bali, 2014



Gambar 3.14 memperlihatkan rumah tangga yang menggunakan tangki/SPAL cukup besar, yaitu mencapai 80.43 persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan selain SPAL

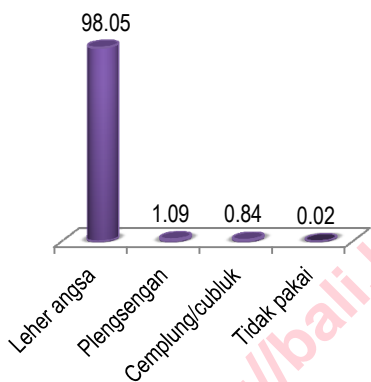
juga masih ada, seperti kolam/sawah (0,21 persen), lainnya (0,37 persen), sungai/danau/laut (3,36 persen), pantai/ tanah lapang/ kebun (5,68 persen), dan lubang tanah (9,95 persen). Masih tingginya rumah tangga yang jambannya belum menggunakan SPAL bisa menunjukkan perilaku tidak sehat masyarakat yang diakibatkan oleh keadaan ekonomi, keterbatasan akses/ ketersediaan fasilitas, dan wawasan masyarakat sendiri. Bila dilihat menurut kabupaten/kota, kabupaten dengan persentase rumah tangga yang menggunakan SPAL terendah adalah Kabupaten Bangli yang mencapai 58,44 persen (lihat Lampiran Tabel 13).

Selanjutnya, komponen penting lain dari jamban adalah kloset. Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus yang dibedakan menjadi leher angsa, plengsengan, cemplung/cubluk, dan tidak memakai kloset. Kakus leher angsa merupakan salah satu jenis jamban/kakus yang memenuhi persyaratan kesehatan, karena menghindari pencemaran pada sumber-sumber air minum, dan permukaan tanah yang ada di sekitar jamban; menghindari atau mencegah timbulnya bau; tidak memungkinkan berkembang biaknya lalat; serta dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Gambar 3.15 menunjukkan bahwa sebagian besar (98,05 persen) rumah tangga di Bali sudah menggunakan leher angsa. Namun, ternyata masih ada rumah tangga yang menggunakan plengsengan (1,09 persen), cemplung/cubluk (0,84 persen), dan bahkan tidak pakai (0,02 persen). Dibanding tahun 2013, persentase rumah tangga yang menggunakan kloset sudah meningkat, yaitu dari 99,93 persen menjadi 99,98 persen pada tahun 2014 (lihat Lampiran Tabel 12), walaupun diantaranya masih menggunakan kloset jenis plengsengan dan cemplung/cubluk, yang sebenarnya

belum memenuhi standar kesehatan. Kloset jenis plengsengan ternyata masih digunakan di fasilitas tempat buang air besar milik sendiri (lihat Tabel 3.2).

Gambar 3.15 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset di Provinsi Bali, 2014



Tabel 3.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar dan Jenis Kloset di Provinsi Bali, 2014

Penggunaan fasilitas tempat buang air besar	Jenis kloset			
	Leher angsa	Pleng Sengan	Cemplung/cubluk	Tidak pakai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sendiri	98,14	1,00	0,87	-
Bersama	97,73	1,41	0,76	0,10
Umum	95,89	4,11	-	-

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Susenas 2014, ada kecenderungan peningkatan rumah tangga di Bali yang tinggal di rumah dengan status sewa atau kontrak. Rumah tangga yang menyewa rumah atau pun mengontrak pada tahun 2014 meningkat dibanding tahun 2013. Hal ini banyak ditemukan di Kota Denpasar dan Badung yang merupakan kota tujuan migran di Bali.

Dari sisi kualitas, mayoritas rumah di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan kualitas. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator perumahan, seperti sebagian besar sudah berlantai bukan dari tanah, beratap genteng dan seng, serta berdinding tembok. Beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Jembrana, Bangli, Karangasem, dan Buleleng masih terdapat rumah yang kualitasnya lebih rendah dibanding kabupaten/kota lainnya di Bali.

Dari aspek fasilitas rumah tinggal juga menunjukkan kondisi yang cukup baik. Sebagian besar rumah tangga di Provinsi Bali telah memiliki fasilitas rumah yang memadai dan memenuhi aspek kesehatan, seperti sebagian besar rumah tangga sudah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama, menggunakan air minum dari sumber terlindung, dan telah memiliki fasilitas buang air besar, baik yang merupakan milik sendiri, milik

bersama (dimiliki bersama oleh beberapa rumah tangga), dan umum. Namun, persentase rumah tangga yang tinggal di rumah dengan jarak antara sumber air minum ke tempat penampungan tinja tidak memenuhi standar kesehatan (< 10 meter) cenderung meningkat di Bali. Hal ini diduga sebagai dampak dari pemukiman yang semakin padat di Bali.

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

1. Aspriani, D.A.O., Budiono, A.R., Sirtha, I.R. 2014. Status Kepemilikan Tanah *Druwe* Desa di Bali. Diambil dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/445/441>. (22 September 2015).
2. Biro Humas Setda Provinsi Bali. 2015. Program Unggulan Bedah Rumah. Diambil dari <http://www.birohumas.baliprov.go.id/>. (14 September 2015).
3. Keman, Soedjajadi. 2005. Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Pemukiman. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol. 2 No. 1 Hal. 29-42*. FKM Universitas Airlangga.
4. Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 7. Sekretariat Negara. Jakarta
5. Republik Indonesia. 1999. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

LAMPIRAN

<http://bali.bps.go.id>

Tabel 1. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2014

Kabupaten/ Kota	Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati							
	Milik Sendiri	Kontrak	Sewa	Bebas Sewa Milik Orang Lain	Bebas Sewa Milik Orang Tua/ Sanak Saudara	Dinas	Lain nya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
01. Jembrana	86,13	1,27	1,54	0,85	8,27	1,94	0,00	
02. Tabanan	84,52	2,60	4,82	2,06	6,00	0,00	0,00	
03. Badung	60,96	3,25	28,28	1,12	5,61	0,79	0,00	
04. Gianyar	85,91	1,83	7,09	0,63	3,40	1,13	0,00	
05. Klungkung	93,40	1,88	0,45	0,59	3,47	0,22	0,00	
06. Bangli	90,40	2,04	1,07	0,84	5,42	0,24	0,00	
07. Karangasem	91,53	0,62	0,16	0,68	6,89	0,12	0,00	
08. Buleleng	78,91	3,40	2,49	4,12	10,56	0,53	0,00	
71. Denpasar	33,85	9,63	41,01	3,50	7,68	4,09	0,23	
51. Bali	2014	69,80	4,07	15,59	2,12	6,92	1,44	0,06
	2013	71,47	3,38	14,39	2,91	6,88	0,93	0,04
	2012	75,00	3,77	12,74	1,85	0,84	5,81	0,00

Tabel 2. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Tanah Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2014

Kabupaten/Kota	Status Tanah Tempat Tinggal*)				
	Hak Milik	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01. Jembrana	92,52	0,86	5,07	1,56	
02. Tabanan	82,80	2,06	15,14	0,00	
03. Badung	66,40	2,39	24,43	6,73	
04. Gianyar	48,31	2,22	47,21	2,27	
05. Klungkung	62,64	0,50	36,15	0,71	
06. Bangli	87,55	0,61	10,50	1,34	
07. Karangasem	77,92	0,56	20,10	1,42	
08. Buleleng	88,67	1,34	7,78	2,20	
71. Denpasar	80,37	2,90	14,54	2,18	
51. Bali	2014	76,76	1,61	19,40	2,22

Keterangan:

***) hanya untuk rumah milik sendiri**

Tabel 3. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2014

Kabupaten/ Kota	Luas Lantai					
	< 20 m ²	20 – 49 m ²	50 – 99 m ²	100-149 m ²	≥ 150 m ²	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
01. Jembrana	3,85	38,26	41,47	10,78	5,65	
02. Tabanan	7,38	18,35	46,56	19,90	7,82	
03. Badung	22,27	17,73	33,96	16,56	9,48	
04. Gianyar	5,95	18,75	41,74	20,02	13,54	
05. Klungkung	2,28	31,83	44,14	15,89	5,82	
06. Bangli	4,14	41,60	43,55	8,36	2,35	
07. Karangasem	6,02	40,56	39,59	10,50	3,33	
08. Buleleng	3,35	39,09	38,66	9,34	4,56	
71. Denpasar	35,74	18,87	17,44	14,30	13,65	
51. Bali	2014	15,52	27,01	34,84	14,11	8,52
	2013	16,18	26,85	35,60	12,78	8,59
	2012	13,93	28,07	36,87	12,94	8,19

Tabel 4. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2014

Kabupaten/ Kota	Jenis Atap Terluas						
	Beton	Genteng	Sirap	Seng	Asbes	Ijuk/ Rumbia	Lain nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Jembrana	1,64	95,70	0,00	0,62	2,05	0,00	0,00
02. Tabanan	1,96	90,55	0,14	4,97	2,38	0,00	0,00
03. Badung	0,79	86,83	0,29	1,19	10,80	0,00	0,11
04. Gianyar	3,42	92,37	0,14	0,56	3,51	0,00	0,00
05. Klungkung	2,55	87,49	0,40	2,92	6,17	0,26	0,22
06. Bangli	3,01	59,87	1,21	27,15	7,65	0,00	1,10
07. Karangasem	1,37	76,88	0,09	9,05	11,89	0,57	0,14
08. Buleleng	1,06	49,51	0,60	44,68	3,84	0,18	0,12
71. Denpasar	2,51	77,25	0,09	2,75	17,39	0,00	0,00
51. Bali	1,92	77,69	0,28	11,09	8,82	0,10	0,12

Tabel 5. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2014

Kabupaten/Kota	Jenis Dinding Terluas				
	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01. Jembrana	90,93	1,05	8,02	0,00	
02. Tabanan	97,87	0,53	1,60	0,00	
03. Badung	97,81	1,10	0,95	0,14	
04. Gianyar	99,11	0,14	0,76	0,00	
05. Klungkung	98,94	0,60	0,00	0,46	
06. Bangli	92,09	2,36	5,30	0,25	
07. Karangasem	95,90	0,12	3,84	0,14	
08. Buleleng	92,70	1,59	4,98	0,72	
71. Denpasar	96,44	1,94	1,09	0,53	
51. Bali	2014	95,89	1,18	2,62	0,31
	2013	95,48	1,13	2,46	0,93
	2012	95,23	1,47	3,01	0,29

Tabel 6. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Bali, 2014

Kabupaten/Kota	Sumber Penerangan					
	PLN	Non PLN	Petromak /Aladin	Pelita/Sentir/Obor	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
01. Jembrana	99,70	0,00	0,00	0,00	0,30	
02. Tabanan	99,57	0,00	0,00	0,32	0,11	
03. Badung	99,89	0,00	0,00	0,11	0,00	
04. Gianyar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05. Klungkung	98,92	0,15	0,00	0,92	0,00	
06. Bangli	98,37	0,44	0,00	0,93	0,27	
07. Karangasem	98,18	0,00	0,00	1,82	0,00	
08. Buleleng	98,72	0,34	0,00	0,71	0,23	
71. Denpasar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51. Bali	2014	99,41	0,08	0,00	0,42	0,08
	2013	99,40	0,01	0,03	0,44	0,11
	2012	98,68	0,42	0,00	0,82	0,07

Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum Utama di Provinsi Bali, 2014 (berlanjut...)

Kabupaten/ Kota	Sumber Air Minum Utama						
	Air Kemasan Bermerk	Air Isi Ulang	Leding Meteran	Leding Eceran	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
01. Jembrana	20,20	5,79	20,69	0,00	13,96	21,02	
02. Tabanan	16,85	6,16	22,67	2,25	6,17	3,66	
03. Badung	41,84	17,47	8,51	0,00	11,89	6,19	
04. Gianyar	16,72	3,42	22,77	0,28	18,11	4,98	
05. Klungkung	12,87	0,31	47,77	1,45	2,06	8,38	
06. Bangli	3,30	0,29	27,06	0,91	0,70	0,19	
07. Karangasem	5,62	0,09	34,69	2,55	4,93	7,78	
08. Buleleng	6,69	7,26	21,38	2,81	4,76	5,15	
71. Denpasar	63,34	24,40	3,92	0,09	4,64	1,45	
51. Bali	2014	28,09	10,87	18,24	1,08	7,53	5,44
	2013	27,13	9,95	19,72	0,82	6,43	7,90
	2012	36,07	24,55	0,49	5,65	8,12	0,51

Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum Utama di Provinsi Bali, 2014 (lanjutan...)

Kabupaten/ Kota	Sumber Air Minum Utama						
	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Sungai	Air Hujan	Lainnya	
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
01. Jembrana	1,38	8,51	0,29	8,16	0,00	0,00	
02. Tabanan	0,08	38,66	2,35	0,96	0,18	0,00	
03. Badung	0,00	13,07	0,61	0,00	0,31	0,10	
04. Gianyar	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
05. Klungkung	0,00	4,89	0,00	0,00	22,27	0,00	
06. Bangli	0,18	39,31	2,86	0,00	23,08	2,12	
07. Karangasem	0,63	23,36	5,81	0,59	8,37	0,00	
08. Buleleng	1,34	42,33	7,93	0,20	0,15	0,00	
71. Denpasar	0,00	1,98	0,07	0,00	0,10	0,00	
51. Bali	2014	0,39	22,09	2,35	0,73	3,05	0,13
	2013	0,40	19,69	2,95	1,13	3,86	0,03
	2012	17,80	2,11	1,38	3,31	0,00	36,07

Tabel 8. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jarak Sumber Air Minum Utama*) ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Provinsi Bali, 2014

Kabupaten/Kota	Jarak ke Tempat Pembuangan Tinja			
	< 10 m	≥ 10 m	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	
01. Jembrana	31,33	65,48	3,19	
02. Tabanan	4,34	95,10	0,56	
03. Badung	12,66	71,78	15,56	
04. Gianyar	8,19	91,17	0,64	
05. Klungkung	12,48	86,50	1,02	
06. Bangli	9,82	78,17	12,01	
07. Karangasem	16,09	75,62	8,29	
08. Buleleng	6,32	64,09	29,60	
71. Denpasar	32,78	59,48	7,74	
51. Bali	2014	11,94	75,77	12,29
	2013	11,05	76,59	12,35
	2012	11,63	73,95	14,42

Keterangan:

*) Sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung

Tabel 9. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Cara Memperoleh Air Minum di Provinsi Bali, 2014

Kabupaten/Kota	Cara Memperoleh		
	Membeli	Tidak Membeli	
(1)	(2)	(3)	
01. Jembrana	50,54	49,46	
02. Tabanan	60,25	39,75	
03. Badung	73,95	26,05	
04. Gianyar	48,41	51,59	
05. Klungkung	68,49	31,51	
06. Bangli	57,25	42,75	
07. Karangasem	62,90	37,10	
08. Buleleng	73,18	26,82	
71. Denpasar	90,44	9,56	
51. Bali	2014	66,04	33,96
	2013	67,37	32,63
	2012	66,35	33,65

Tabel 10. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Air Minum di Provinsi Bali, 2014

Kabupaten/Kota	Penggunaan Fasilitas Air Minum				
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01. Jembrana	68,60	30,38	0,47	0,55	
02. Tabanan	53,49	43,86	1,45	1,20	
03. Badung	54,64	42,44	2,12	0,80	
04. Gianyar	45,45	54,55	0,00	0,00	
05. Klungkung	44,91	18,47	33,72	2,90	
06. Bangli	29,51	9,02	58,20	3,28	
07. Karangasem	44,83	36,21	12,07	6,90	
08. Buleleng	68,68	20,00	0,38	10,94	
71. Denpasar	64,29	28,57	7,14	0,00	
51. Bali	2014	55,93	27,87	13,87	2,32
	2013	52,10	32,46	14,05	1,39
	2012	53,17	28,65	15,48	2,70

Tabel 11. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Bali, 2014

Kabupaten/Kota	Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar				
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01. Jembrana	66,37	22,96	0,50	10,16	
02. Tabanan	76,42	15,02	0,00	8,56	
03. Badung	74,21	23,65	0,16	1,99	
04. Gianyar	72,06	20,87	0,13	6,95	
05. Klungkung	64,49	16,75	0,00	18,76	
06. Bangli	50,70	20,89	0,00	28,41	
07. Karangasem	55,33	19,41	0,35	24,90	
08. Buleleng	71,88	16,69	0,16	11,27	
71. Denpasar	82,18	17,57	0,25	0,00	
51. Bali	2014	71,76	19,06	0,19	8,99
	2013	69,25	20,10	0,27	10,38
	2012	68,50	20,10	0,13	11,27

Tabel 12. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset di Provinsi Bali, 2014

Kabupaten/Kota	Jenis Kloset				
	Leher Angsa	Plengsengan	Cemplung/Cubluk	Tidak Pakai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01. Jembrana	98,26	0,54	1,20	0,00	
02. Tabanan	98,67	0,63	0,70	0,00	
03. Badung	99,40	0,26	0,34	0,00	
04. Gianyar	99,34	0,14	0,52	0,00	
05. Klungkung	99,83	0,17	0,00	0,00	
06. Bangli	96,84	0,77	1,87	0,52	
07. Karangasem	98,50	1,50	0,00	0,00	
08. Buleleng	93,75	3,33	2,92	0,00	
71. Denpasar	98,84	0,98	0,18	0,00	
51. Bali	2014	98,05	1,09	0,84	0,02
	2013	98,30	0,96	0,67	0,07
	2012	97,03	1,96	0,91	0,11

Tabel 13. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Bali, 2014

Kabupaten/ Kota	Tempat Pembuangan Akhir Tinja						
	Tangki/ SPAL	Kolam/ Sawah	Sungai/ Danau/ Laut	Lubang Tanah	Pantai/ Tanah Lapang/ Kebun	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
01. Jembrana	86,19	0,00	3,38	3,55	6,17	0,71	
02. Tabanan	65,71	0,00	6,96	24,39	2,94	0,00	
03. Badung	64,08	0,20	1,44	33,23	0,88	0,18	
04. Gianyar	91,96	0,16	5,71	0,63	1,30	0,24	
05. Klungkung	80,11	0,00	3,14	1,13	15,45	0,17	
06. Bangli	58,44	0,28	1,86	12,82	26,61	0,00	
07. Karangasem	67,39	0,42	4,91	6,78	18,66	1,84	
08. Buleleng	82,07	0,32	5,94	5,59	5,52	0,56	
71. Denpasar	99,66	0,25	0,00	0,08	0,00	0,00	
51. Bali	2014	80,43	0,21	3,36	9,95	5,68	0,37
	2013	86,13	0,28	4,27	2,90	6,12	0,30
	2012	86,23	0,08	3,99	1,61	7,48	0,61

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Jl. Raya Puputan No. 1 Renon Denpasar 80226

Telp. (0361) 238159, Fax. (0361) 238162

Homepage: <http://bali.bps.go.id>

E-mail: bps5100@bps.go.id

